



LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024



RUSLI MOIDADY, ST., MT
Bupati

SERFI KAMBEY
Wakil Bupati



Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga tugas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah yang menjalankan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di amanatkan melalui Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, laporan ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan koreksi menyeluruh terhadap berjalannya suatu Pemerintahan Daerah.

Besar harapan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini, dapat mewujudkan dan meningkatkan citra Pemerintahan Daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akhirnya, perkenankan kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Banggai Kepulauan di berbagai sektor pembangunan sehingga dapat mendorong dan meningkatkan daya pacu dalam rangka terwujudnya cita-cita "**Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera, dan Merata**" Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan meridhai semua Ikhtiar yang kita lakukan. Aamiin.

Salakan, 27 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I PENDAHULUAN	I/1
1.1. Latar Belakang	I/1
1.1.1 Penjelasan Umum	I/2
a. Undang-undang pembentukan daerah	I/2
b. Data geografis wilayah	I/3
c. Jumlah penduduk	I/11
d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan	I/13
e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah ..	I/13
f. Rincian Aparatur Sipil pegawai pemerintah	I/16
g. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah	I/18
h. Pelaksanaan Program berdasarkan urusan pemerintahan..	I/20
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I/31
a. Permasalahan strategis pemerintah daerah	I/31
b. Visi dan misi kepala daerah	I/33
c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan	I/34
d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	I/39
1.1.3 Penerapan standard pelayanan minimal	I/42
BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II/1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II/1
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	II/2
2.2.1 Indikator kinerja kunci keluaran	
2.2.2 Indikator kinerja kunci hasil	
2.2.3 Indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan Pemerintahan	
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	II/3



a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja	II/3
b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	II/5
c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.....	II/6
d. Pengukuran capaian dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka pendek	II/8
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	II/10
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	II/10
BAB. III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III/1
1. Dasar Hukum	III/1
2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan	III/1
3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	III/4
3.1 Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten	III/4
3.1.1 Target Kinerja	III/4
3.1.2 Realisasi	III/4
3.2 Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten	III/4
3.2.1 Target Kinerja	III/4
3.2.2 Realisasi	III/4
3.3 Permasalahan dan kendala	III/4
3.4 Saran dan tindak lanjut	III/4
BAB. IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV/1
4.1 Urusan Pendidikan	IV/1
4.1.1 Jenis pelayanan dasar	IV/1
4.1.2 Target pencapaian	IV/1
4.1.3 Realisasi	IV/2
4.1.4 Alokasi Anggaran	IV/3
4.1.5 Dukungan Personil	IV/4
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	IV/4
4.1.7 Program Kegiatan	IV/4
4.2 Urusan Kesehatan	IV/6



4.2.1 Jenis pelayanan dasar	IV/6
4.2.2 Target pencapaian	IV/6
4.2.3 Realisasi	IV/8
4.2.4 Alokasi Anggaran	IV/16
4.2.5 Dukungan Personil	IV/16
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	IV/17
4.2.7 Program Kegiatan	IV/17
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV/18
4.3.1 Jenis pelayanan dasar	IV/18
4.3.2 Target pencapaian	IV/18
4.3.3 Realisasi	IV/19
4.3.4 Alokasi Anggaran	IV/22
4.3.5 Dukungan Personil	IV/22
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	IV/22
4.3.7 Program Kegiatan	IV/23
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV/23
4.4.1 Jenis pelayanan dasar	IV/23
4.4.2 Target pencapaian	IV/24
4.4.3 Realisasi	IV/24
4.4.4 Alokasi Anggaran	IV/25
4.4.5 Dukungan Personil	IV/25
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	IV/25
4.4.7 Program Kegiatan	IV/25
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV/26
a. Satuan Polisi Pamong Praja	IV/26
4.5.1 Jenis pelayanan dasar	IV/26
4.5.2 Target pencapaian	IV/26
4.5.3 Realisasi	IV/27
4.5.4 Alokasi Anggaran	IV/28
4.5.5 Dukungan Personil	IV/28
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	IV/29
4.5.7 Program Kegiatan	IV/29
b. Bencana	IV/30
4.5.1 Jenis pelayanan dasar	IV/30
4.5.2 Target pencapaian	IV/31
4.5.3 Realisasi	IV/31



4.5.4 Alokasi Anggaran	IV/32
4.5.5 Dukungan Personil	IV/32
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	IV/32
4.5.7 Program Kegiatan	IV/33
4.6 Urusan Sosial	IV/34
4.6.1 Jenis pelayanan dasar	IV/34
4.6.2 Target pencapaian	IV/34
4.6.3 Realisasi.....	IV/35
4.6.4 Alokasi Anggaran	IV/38
4.6.5 Dukungan Personil	IV/38
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	IV/38
4.6.7 Program Kegiatan	IV/39

BAB. V	PENUTUP	V-1
5.1.	Kesimpulan	V/1
5.2.	Saran.....	V/1

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel	Uraian	Hal
1.1	Luas wilayah administrasi per kecamatan di Kab. Banggai kepulauan	I/4
1.2	Kondisi topografi rata-rata per kecamatan di kab. bangkep	I/5
1.3	Klasifikasi tanah (soil taxonomy PPT, 1998) kab bangkep	I/6
1.4	Panjang wilayah sungai Kab. Bangkep	I/8
1.5	Distribusi sungai dan danau berdasarkan satuan ekorigion kab. bangkep	I/9
1.6	Kondisi Iklim Cura Hujan dan Suhu Udara Tahun 2024	I/10
1.7	Kondisi Iklim Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Pada Tahun 2024	I/10
1.8	Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di kab. Bangkep tahun 2024	I/11
1.9	Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024	I/11
1.10	Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin per kecamatan di kab. bangkep tahun 2024	I/12
1.11	Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan Tahun 2024	I/13
1.12	Jumlah Perangkat Daerah kab. bangkep tahun 2024	I/14
1.13	Jumlah Unit perangkat daerah kab. bangkep tahun 2024	I/15
1.14	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024	I/16
1.15	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024	1/34
1.16	Rencana Program / Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	1/39
2.1	Capaian kinerja Makro kab.bangkep tahun 2024	II/1
2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024	II/4
2.3	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja pada perjanjian Kinerja tahun 2024	II/5
2.4	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan Dengan capaian kinerja tahun sebelumnya	II/7
2.5	Capaian kinerja dibandingkan dengan Target RPD 2023-2026 kabupaten banggai kepulauan	II/8
4.8	Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023	IV/26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merumuskan rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek dengan memperhatikan masukan, aspirasi serta kebutuhan masyarakat Banggai Kepulauan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Berdasarkan rencana pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun yang secara teknis dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan untuk mencapai seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD/RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Secara operasional, rencana tahunan tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran



2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, pada akhir Tahun Anggaran 2024 disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga diketahui prestasinya secara nasional.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 menggambarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2024. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Salakan, Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966). pasal 5 menyebutkan Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai dengan Ibukota Salakan yang pada saat itu masih terdiri atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Banggai, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung,



Kecamatan Liang, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Buko, Kecamatan Labobo Bangkurung.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengembangkan wilayah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kemudian pada tahun 2012 dilakukan pemekaran kecamatan sehingga jumlah kecamatan telah mencapai 19 (Sembilan Belas) kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bulagi Selatan.

Kemudian pada tahun 2013 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai laut sebagai pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengambil beberapa Kecamatan sehingga sampai dengan saat ini Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal memiliki 12 Kecamatan saja yang meliputi:

1. Kecamatan Tinangkung
2. Kecamatan Tinangkung Selatan
3. Kecamatan Tinangkung Utara
4. Kecamatan Totikum
5. Kecamatan Totikum Selatan
6. Kecamatan Liang
7. Kecamatan Peling Tengah
8. Kecamatan Bulagi Utara
9. Kecamatan Bulagi
10. Kecamatan Bulagi Selatan
11. Kecamatan Buko
12. Kecamatan Buko Selatan

b. Data Geografis Wilayah.

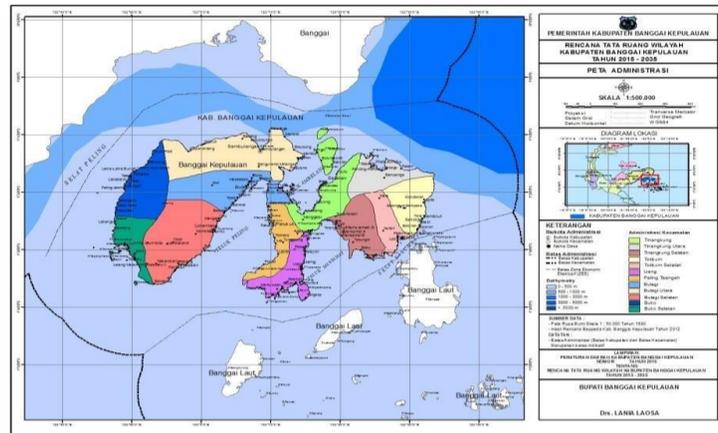
Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang letaknya paling timur dan merupakan gugusan kepulauan, karena merupakan daerah kepulauan maka memiliki banyak potensi perairan seperti perikanan dan pariwisata apalagi daerah ini hanya berbatasan laut dengan Provinsi Maluku di sebelah timur . Secara geografis Kabupaten Banggai Kepulauan terletak pada posisi 1° 06' 30" Lintang Selatan sampai dengan 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9" Bujur Timur di Jazirah Timur Laut Pulau Sulawesi.

Batas-batas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- *Sebelah Utara* : kabupaten Banggai
- *Sebelah Selatan* : Kabupaten Banggai Laut
- *Sebelah timur* : Laut Maluku, dan
- *Sebelah Barat* : Selat Peling



Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan



Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki luas wilayah $\pm 9.160,11 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari luas darat $2.488,79 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari satu pulau besar dan beberapa pulau kecil dan luas laut $6.671,32 \text{ Km}^2$ atau sekitar $72,83 \%$ dari luas keseluruhan. Secara rinci luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	
	Darat	Laut
01. Totikum	155,45	1.082,85
02. Totikum Selatan	95,19	663,09
03. Tinangkung	312,60	446,96
04. Tinangkung Selatan	187,89	251,23
05. Tinangkung Utara	136,65	195,38
06. Liang	176,19	507,78
07. Peling Tengah	140,00	403,49
08. Bulagi	275,66	303,58
09. Bulagi Selatan	319,00	351,45
10. Bulagi Utara	318,00	350,21
11. Buko	184,84	1.050,60
12. Buko Selatan	187,32	1.064,70
Banggai Kepulauan	2.488,79	6.671,32

Sumber : BPS KAB. Bangkep tahun 2024

1. Topografi dan Kemiringan Lereng

Berdasarkan Topografi, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.



Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥ 40 persen. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh wilayah, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas muka air laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam (30-40 persen).

Pegunungan dan perbukitan karst menempati sebagian besar wilayah, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong. Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara, dan sebagian kecil di bagian selatan.

Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Kondisi topografi rata-rata per kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan

N o	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
1	Totikum	Sambiut	10
2	Totikum Selatan	Kalumbatan	2
3	Tinangkung	Salakan	3
4	Tinangkung Selatan	Mansamat A	3
5	Tinangkung Utara	Batulombu	1
6	Liang	Liang	2
7	Peling Tengah	Patukuki	2
8	Bulagi	Bulagi 1	3
9	Bulagi Selatan	Lolantang	5
10	Bulagi Utara	Sambulangan	5
11	Buko	Tataba	2
12	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	3

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan tahun 2024

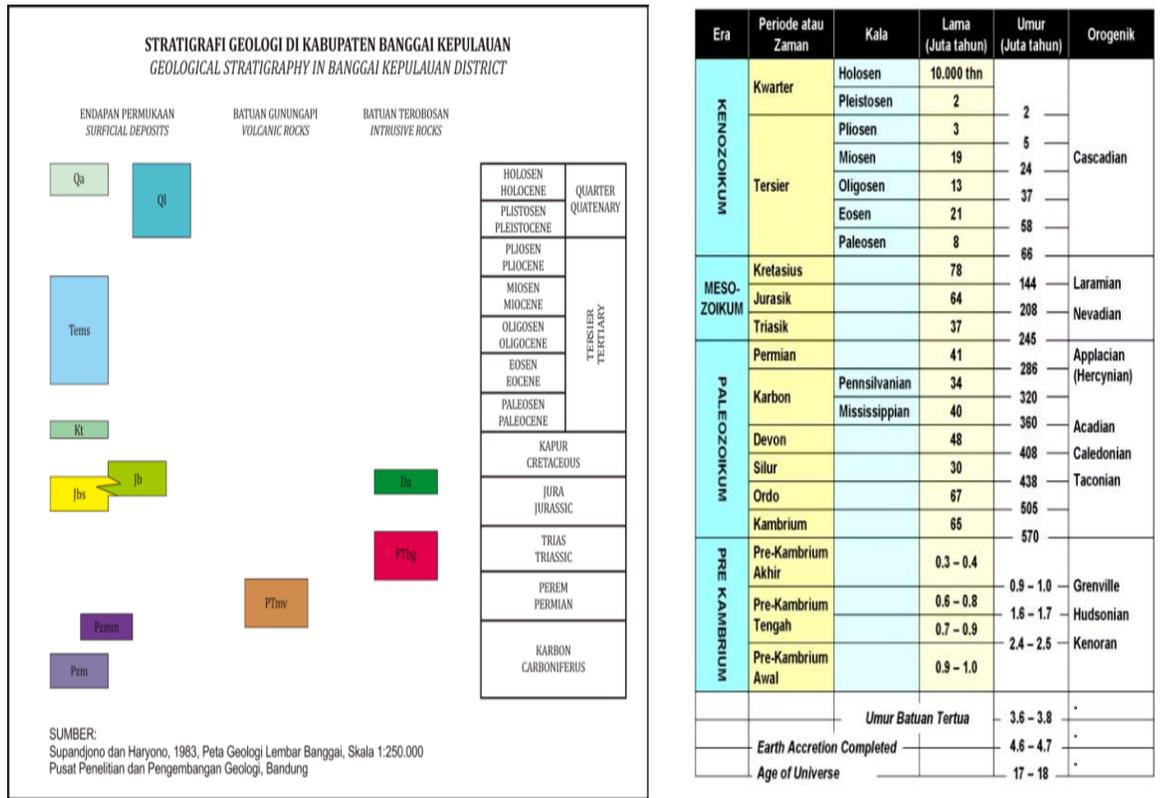
2. Geologi

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunung api. Batuan tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit. Kemudian menyusul



Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari perselingan batu gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikan radiometri menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan). Stratigrafi batuan penyusun Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam Gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber: KLHS RTRW Kab. Banggai Kepulauan 2022-2042

Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat 4 (empat) klasifikasi tanah tingkat ordo berdasarkan Soil Taxonomy (PPT Bogor, 1998), yaitu: *Entisols*, *Inceptisols*, *Ultisols*, dan *Mollisols*, yang dapat dirinci seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Klasifikasi Tanah (Soil Taxonomy PPT, 1998)
Kabupaten Banggai Kepulauan

Ordo	Grup	Karakteristik	Satuan Ekoregion
Entisols Aluvial	Fluvaquents	<ul style="list-style-type: none"> Stratigrafi lapisan dari bahan-bahan yang berbeda, warna coklat gelap kekelabuan (10YR 4/2), tekstur bervariasi bergantung endapan. pH agak masam hingga netral, BO sedang hingga tinggi, P dan K total rendah hingga sangat tinggi, KTK rendah hingga tinggi, kejenuhan basa sangat tinggi. 	Perbukitan atau Pegunungan (F1)



Ordo	Grup	Karakteristik	Satuan Ekoregion
	Endoaquents	<ul style="list-style-type: none">Gleisasi sempurna dari bawah sampai atas.Warna kelabu (5YR 5/1) dengan/tanpa karatan di lapisan atas, tekstur lempung hingga lempung berpasir.Tanah agak alkalis pada daerah genangan, kadar P total sangat tinggi hingga sangat rendah, K total sangat tinggi, KTK dan kejenuhan basa tinggi hingga sangat tinggi.	Dataran Aluvial Rawa Lembah antar (F2)
	Psammaquents	<ul style="list-style-type: none">Warna kelabu agak gelap hingga gelap (5YR 3/1).Struktur berbutir lepas, tekstur kasar (pasir berlempung hingga lebih kasar).Tanah sangat asam, BO rendah hingga sedang, P total rendah hingga sangat rendah, K total sedang hingga rendah, KTK rendah hingga sangat rendah, kejenuhan basa sangat tinggi.	Dataran Aluvial Pesisir (Fm)
	Quartzipsamments	<ul style="list-style-type: none">Tekstur kasar (pasir dengan sedikit kandungan pasir kuarsa), warna coklat gelap (7,5YR 4/3), drainase cepat.Tanah agak masam hingga netral, BO sgt rendah, P dan K total sangat rendah, KTK dan kejenuhan	Wilayah Pesisir Bergisik (M)
Ultisols Podsolik	Kandiudults	<ul style="list-style-type: none">Horison kandik dengan penurunan lempung <20 persen hingga kedalaman 150 cm, drainase baik.Lapisan atas berwarna coklat gelap (10YR 4/3) sampai coklat gelap kekuningan (10YR 4/6), lapisan bawah coklat kekuningan (10YR 5/6) sampai merah kekuningan (5YR 5/6).Tekstur halus hingga sedang, struktur kersai hingga gumpal agak membulat, konsistensi sangat gembur hingga gembur (lembab) agak lekat sampai lekat (basah).Tanah masam, BO rendah, P dan K total sangat rendah hingga rendah, KTK dan kejenuhan basa rendah hingga sangat rendah, Al sangat tinggi.	Perbukitan Intrusif Vulkanik Tua (V) Perbukitan Struktural Patahan Batuan Gunungapi Tua (S1)
Inceptisols Kambisol	Dystrudepts	<ul style="list-style-type: none">Solum sedang hingga dalam, warna coklat (7,5YR 4/6) sampai coklat kekuningan (10YR 5/8).Tekstur halus, struktur gumpal, konsistensi agak teguh hingga teguh, bahan induk batu gamping, batu lempung, dan batu pasir.Tanah masam hingga netral, BO umumnya rendah, K total sangat rendah hingga sedang, P total rendah hingga sangat rendah, KTK rendah, basa rendah, Al tinggi hingga sangat tinggi.	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Batuan Malihan dan Batugamping Napal (S2) (dominan) Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K)
Oxisols Latosol	Kandiudoxs	<ul style="list-style-type: none">Horison kandik, drainase baik, warna homogen coklat hingga coklat kemerahan dan merah kotor (10YR 3/3-3/4 sampai 2,5YR 3/3-3/4) untuk lapisan, coklat kekuningan hingga coklat tua merah kekuningan (10YR 4/6-5/6 sampai 5YR 4/6-6/6) untuk lapisan bawah.	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K)



Ordo	Grup	Karakteristik	Satuan Ekoregion
		<ul style="list-style-type: none">▪ Tekstur lempung berdebu hingga lempung, struktur agak gumpal hingga kersai, konsistensi sangat gembur (lembab) dan lekat hingga plastis (basah).▪ Tanah netral hingga agak basa, BO rendah hingga sedang (atas) dan sangat rendah (bawah), P dan K total sangat rendah, KTK rendah, dan kejenuhan basa tinggi.	(dominan) Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan (S2)

Sumber: BP3, Departemen Pertanian RI (2006) dan Hasil Survei Lapangan (Mei-Juni, 2012) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012)

Berdasarkan laporan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Geoteknologi Bandung Tahun 2003, secara umum ketersediaan air di Kabupaten Banggai Kepulauan yang dianalisis menggunakan metode Thornwaite, diperoleh hasil bahwa terjadi surplus air pada bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus; Di lain pihak, defisit air terjadi pada bulan-bulan Januari, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya, jika digunakan koefisien runoff sebesar 0,5 atau 50 persen, maka menurut neraca meteorologis, jumlah volume air di Pulau Peling mencapai 1.498.816.834 m³/tahun (LIPI-Geotek, 2003 dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2012).

3. Hidrologi

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat pengalirannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) sungai perennial, sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang biasanya bersumber dari mata air berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b) sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Wilayah Sungai di Kabupaten Banggai Kepulauan di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Panjang wilayah sungai di
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Sungai	Panjang (m)
1	Paisu Tatakalai	± 8.400
2	Paisu Tembang	± 11.700
3	Paisu Puso Palam	± 2.200
4	Paisu Babasal Kombutokan	± 2.500
5	Paisu Moi Abason	± 5.500
6	Paisu Mosoni	± 10.200
7	Paisu Bulito Tobungin	± 7.000



No	Nama Sungai	Panjang (m)
8	Paisu Nipa Mansamat	± 10.400
9	Paisu Manggalai	± 6.200
10	Paisu Momulusan	± 4.300
11	Paisu Patukuki	± 3.200
12	Paisu Malangong	± 4.200
13	Paisu Lalengan	± 5.300
14	Paisu Mata	± 3.900
15	Paisu Talas-talas dan	± 5.000
16	Paisu Kambani	± 2.000

Sumber : Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kab.Bangkep (2016-2036)

Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau yang airnya dapat pula dimanfaatkan dan dikembangkan. Danau di Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain Danau Alani, Danau Tendetung, Danau Luk Panenteng, Danau Lemelu, Danau Ndukukan, Danau Kuakon, Danau Emeluk, Danau Paisu Lamasono dan Danau Lano.

Tabel 1.5
Distribusi sungai dan danau berdasarkan satuan ekoregion
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Danau dan Sungai	Satuan Ekoregion
1	Danau Alani, Buko Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
2	Danau Tendetung, Totikum Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu
3	Sungai Patukuki, Peling Tengah	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
4	Sungai Malangong, Buko	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
5	Sungai Kambani, Bulagi Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
6	Sungai Manggalai, Tinangkung	Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan material Aluvium
7	Sungai Tatalalai, Tinangkung Utara	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium
8	Sungai Babasal Kambutokan, Totikum	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

Sumber : Geotek LIPI (2003) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012)

4. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata jumlah curah hujan selama tahun 2024 berkisar antara 2,8 mm di bulan Oktober dan 180,8 mm di bulan April. Sedangkan jumlah hari hujan selama tahun 2024 berkisar antara 3 hari di bulan Oktober dan 23 hari di bulan April. Suhu



udara rata – rata terendah yaitu 26,6°C sampai 29,1°C, suhu udara minimum terjadi dibulan September yaitu sebesar 22,1°C sedangkan suhu udara maksimum sebesar 34,6°C pada bulan november dan desember. Data tersebut diatas lebih lengkap dapaat dilihat pada Tabel 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.6
Kondisi Iklim Cura Hujan dan Suhu Udara
Tahun 2024

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Precipitation (mm/year)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour)	Suhu / Temperature (°C)		
				Minimum	Rata- rata Average	Maksimum Maximum
Januari/January	77.50	7	6.5	24.70	30.12	35.40
Februari/February	11	11	5.3	24.50	29.58	35.20
Maret/March	72.50	15	5.3	24.40	29.22	35.00
April/April	08.20	16	5.9	24.30	29.00	33.60
Mei/May	486.70	23	3.2	24.20	28.10	32.50
Juni/June	240.20	19	1.9	23.60	26.95	31.40
Juli/July	96.10	29	22	22.10	26.36	30.70
Agustus/August	218.60	31	3.6	22,50	26.43	30.90
September/September	901.10	30	5.9	22,90	28.40	33.10
Oktober/October	7.20	31	6.6	23.70	29.26	33.40
November/November	159.20	30	6.6	23.90	29.61	33.70
Desember/December	60.20	31	4.0	24.90	29.22	33.70

Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2024

Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2024 berkisar antara 4,1 s/d 8,8 knot. tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.005,9 mb sampai 1.010,4 mb. Tekanan udara maksimum terjadi di bulan Agustus. Sedangkan tekanan udara minimum terjadi di bulan Januari. Data tersebut di atas lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.7 di bawah ini :

Tabel 1.7
Kondisi Iklim Kecepatan Angin dan Tekanan Udara
Pada Tahun 2024

Bulan Month	Kecepatan Angin (knot) Wind Velocity (knot)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mbar)		
	Minimum	Rata-Rata Average	Maximum	Minimum	Rata-Rata Average	Maximum
Januari/January	0.00	2.22	7.20	1002.70	1007.32	1012.30
Februari/February	0.00	2.35	9.30	1003.80	1008.57	1012.90
Maret/March	0.00	1.97	6.20	1003.20	1008.08	1012.20
April/April	0.00	1.91	7.70	1003.10	1006.75	1010.30
Mei/May	0.00	2.50	9.30	1002.90	1007.43	1011.20



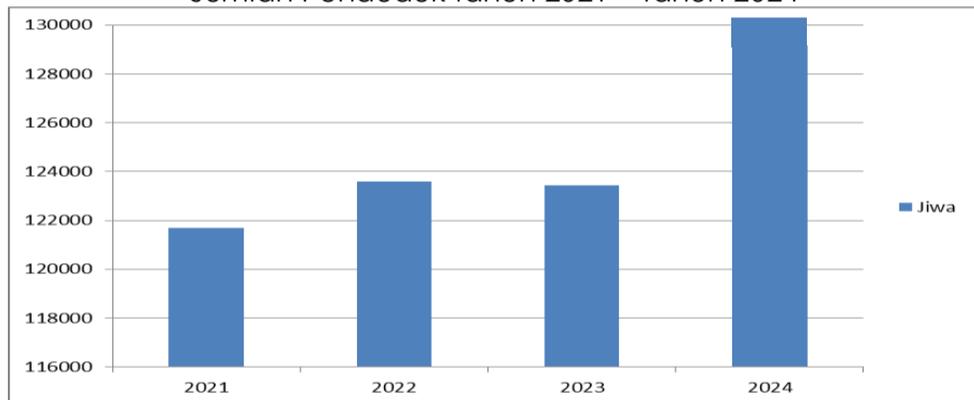
Juni/June	0.00	2.87	10.30	1005.40	1008.96	1012.70
Juli/July	0.00	3.08	9.77	1005.00	1009.47	1012.40
Agustus/August	0.00	3.54	9.26	1009.00	1010.62	1012.30
September/September	0.00	3.21	8.75	1006.90	1009.76	1012.50
Oktober/October	0.00	3.16	8.23	1008.30	1009.45	1011.10
November/November	0.00	2.14	7.72	1005.90	1008.20	1010.40
Desember/December	0.00	2.10	6.17	1004.50	1006.99	1011.30

Sumber: *Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2023*

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah menggambarkan potensi suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2024, penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 130.008 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk tahun 2021 – Tahun 2024



Sumber data : Tahun 2021, 2022, 2023 (Badan Pusat Statistik)
Tahun 2024 Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan menurut struktur usia dan jenis kelamin Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
00-04	4.596	4.323	8.919
05-09	5.835	5.458	11.293
10-14	5.873	5.637	11.510
15-19	5.983	5.887	11.870
20-24	6.323	6.280	12.603
25-29	5.209	4.817	10.026



30-34	4.446	4.304	8.750
35-39	4.458	4.365	8.823
40-44	4.957	4.871	9.828
45-49	4.481	4.446	8.927
50-54	3.825	3.759	7.584
55-59	3.236	3.166	6.402
60-64	2.414	2.360	4.774
65-69	1.674	1.760	3.434
70-74	1.234	1.148	2.382
75≤	1.429	1.454	2.883
Jumlah	65.973	64.035	130.008

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024
Ditjen Dukcapil Kemendagri



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024
Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Tinangkung memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Tinangkung Selatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	TOTIKUM	5.838	5.619	11.457
2	TINANGKUNG	9.566	9.358	18.924
3	LIANG	5.234	5.215	10.449
4	BULAGI	5.031	4.831	9.862
5	BUKO	5.299	5.234	10.553
6	BULAGI SELATAN	5.477	5.187	10.664



7	TINANGKUNG SELATAN	4.411	4.256	8.667
8	TOTIKUM SELATAN	4.838	4.683	9.521
9	PELING TENGAH	5.591	5.437	11.028
10	BULAGI UTARA	5.199	5.010	10.209
11	BUKO SELATAN	4.669	4.561	9.230
12	TINANGKUNG UTARA	4.820	4.644	9.464
JUMLAH		65.973	64.035	130.008

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024
Ditjen Dukcapil Kemendagri

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Banggai Kepulauan secara administrasi terdiri 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa dan 3 kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam table 1.11 diketahui bahwa Kecamatan Bulagi Selatan memiliki Jumlah Desa terbanyak yakni 20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 16 Desa dan Kecamatan Bulagi 15 desa dan 1 kelurahan. Sementara Kecamatan Tinangkung Utara merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu sebanyak 6 desa.

Tabel 1.11
Jumlah Desa dan Kelurahan berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
01.	Totikum	11	-
02.	Totikum Selatan	8	-
03.	Tinangkung	10	1
04.	Tinangkung Selatan	9	-
05.	Tinangkung Utara	6	-
06.	Liang	16	-
07.	Peling Tengah	11	-
08.	Bulagi	15	1
09.	Bulagi Selatan	20	-
10.	Bulagi Utara	11	1
11.	Buko	13	-
12.	Buko Selatan	11	-
Banggai Kepulauan		141	3

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomo 7 Tahun 2017 tentang



Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 36 Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Rumah Sakit Pratama Lumbi lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 13 Puskesmas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.12
Jumlah Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomo 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	Dinas Perikanan	
6	Dinas Kesehatan	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	
9	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	
10	Dinas Pariwisata	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
15	Dinas Sosial	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
18	Dinas Ketahanan Pangan	
19	Dinas Lingkungan Hidup	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	
21	Dinas Perhubungan	
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
23	Dinas Pertanian	Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomo 7 Tahun
24	Dians Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
25	Kecamatan Totikum	
26	Kecamatan Totikum Selatan	



27	Kecamatan Tinangkung	2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
28	Kecamatan Tinangkung Selatan	
29	Kecamatan Tinangkung Utara	
30	Kecamatan Liang	
31	Kecamatan Peling Tengah	
32	Kecamatan Bulagi	
33	Kecamatan Bulagi Selatan	
34	Kecamatan Bulagi Utara	
35	Kecamatan Buko	
36	Kecamatan Buko Selatan	

Tabel 1.13
Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	UPT Dinas Rumah Sakit Umum Daerah	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2	UPT Dinas Rumah Sakit Pratama Lumblambia	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Rumah Sakit Pratama Lumblambia Kabupaten Banggai Kepulauan
3	UPTD Puskesmas Totikum Kec. Totikum	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4	UPTD Puskesmas Salakan Kec. Tinangkung	
5	UPTD Puskesmas Saleati Kec. Liang	
6	UPTD Puskesmas Bulagi Kec. Bulagi	
7	UPTD Puskesmas Tataba Kec. Buko	
8	UPTD Puskesmas Lolantang Kec. Bulagi Selatan	
9	UPTD Puskesmas Mansamat Kec. Tinangkung Selatan	
10	UPTD Puskesmas Patukuki Kec. Peling Tengah	
11	UPTD Puskesmas Lumblambia Kec. Buko Selatan	
12	UPTD Puskesmas Sabang Kec. Bulagi Utara	
13	UPTD Puskesmas Totikum Selatan Kec. Totikum Selatan	
14	UPTD Puskesmas Bakalan Raya Kec. Tinangkung	
15	UPTD Puskesmas Bone Puso Kec. Bulagi Selatan	



f. Rincian Aparatur Sipil Pegawai Pemerintah

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan sebanyak 2.950 Orang yang meliputi 452 orang menduduki jabatan struktural, 1879 orang menduduki jabatan fungsional dan 619 orang menduduki jabatan pelaksana. Data tersebut di atas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 1.14
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	5	0	0	5
2	Bagian Tata Pemerintahan	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	3	7
3	Bagian Hukum	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	1	5
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	3	7
5	Bagian Perekonomian	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	2	6
6	Bagian Administrasi Pembangunan	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	2	6
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	3	7
8	Bagian Organisasi	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	1	5
9	Bagian Umum	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	8	12
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	1	5
11	Sekretariat DPRD	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	9	0	17	26
12	Inspektorat	Fungsi Pengawasan	8	35	7	50
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	21	0	11	32



14	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	21	0	8	29
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	10	8	9	27
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	7	8	20	35
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Wajib	8	3	4	15
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	8	5	8	21
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib	9	11	6	26
20	Dinas Perikanan	Urusan Pemerintahan Pilihan	9	6	11	26
21	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Wajib	9	367	39	451
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Pemerintahan Wajib	19	6	8	33
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Wajib	6	3	6	15
24	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan	8	4	6	18
25	Dinas Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	2	3	12
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Wajib	10	13	3	26
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Wajib	11	11	3	25
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Wajib	15	1.178	130	1.323
29	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan	9	7	6	22
30	Dinas Sosial	Urusan Pemerintahan Wajib	7	6	7	20
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Wajib	10	12	40	62
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan Wajib	7	8	8	23
33	Dinas Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Wajib	7	9	4	20



34	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Wajib	9	5	2	16
35	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib	7	6	4	17
36	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan Wajib	13	1	16	30
37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Urusan Pemerintahan Wajib	9	5	7	21
38	Dinas Pertanian	Urusan Pemerintahan Pilihan	8	47	13	68
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan Wajib	7	5	5	17
40	Kantor Camat Tinangkung	Unsur Kewilayahan	12	0	12	24
41	Kantor Camat Tinangkung Selatan	Unsur Kewilayahan	7	0	10	17
42	Kantor Camat Tinangkung Utara	Unsur Kewilayahan	8	0	11	19
43	Kantor Camat Totikum	Unsur Kewilayahan	8	0	18	26
44	Kantor Camat Totikum Selatan	Unsur Kewilayahan	8	0	13	21
45	Kantor Camat Liang	Unsur Kewilayahan	8	0	25	33
46	Kantor Camat Peling Tengah	Unsur Kewilayahan	7	0	19	26
47	Kantor Camat Bulagi	Unsur Kewilayahan	14	0	21	35
48	Kantor Camat Bulagi Selatan	Unsur Kewilayahan	7	0	12	19
49	Kantor Camat Bulagi Utara	Unsur Kewilayahan	13	0	12	25
50	Kantor Camat Buko	Unsur Kewilayahan	6	0	15	21
51	Kantor Camat Buko Selatan	Unsur Kewilayahan	8	0	8	16
69	UPT Dinas Kesehatan RSUD Trikora		12	95	4	111
70	UPT Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia		5	13	4	22
Jumlah			452	1879	619	2950

Sumber : BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.068.100.041.997,17	1.027.878.702.041,06	96,23
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.571.939.076,17	51.896.513.660,06	88,60
Pajak Daerah	7.038.725.000,00	6.402.433.870,25	90,96
Retribusi Daerah	2.315.684.000,00	1.633.414.640,73	70,54



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.684.000,00	5.269.033.585,00	124,53
Lain-lain PAD yang Sah	44.986.530.076,17	38.591.631.564,08	85,78
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.571.939.076,17	51.896.513.660,06	88,60
PENDAPATAN TRANSFER	980.678.845.921,00	947.132.931.381,00	96,58
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	943.972.144.344,00	911.177.283.524,00	96,53
Dana Perimbangan	825.687.611.344	792.892.750.542,00	96,03
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	140.530.268.344,00	119.953.393,00	85,36
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.339.081.000,00	485.140.550.121,00	99,14
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.206.913.000,00	103.934.930.587,00	96,95
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.611.349.000,00	83.863.876.816,00	94,64
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	112.520.510.000,00	112.520.510.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	118.284.533.000,00	118.284.533.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.706.701.577,00	34.325.320.492,00	93,51
Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan	36.706.701.577,00	34.325.320.492,00	93,51
	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	36.706.701.577,00	35.955.647.857,00	97,95
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	980.678.845.921,00	947.132.931.381,00	96,58
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH	1.068.100.041.997,17	1.027.878.702.041,06	96,23
BELANJA OPERASI	1.120.333.977.631,31	1.029.697.200.070,00	91,91
BELANJA OPERASI	719.419.336.562,00	687.446.840.346,00	95,56
Belanja Pegawai	412.412.175.721,00	400.652.210.789,00	97,15
Belanja Barang dan Jasa	233.604.821.952,00	215.126.519.483,00	92,09
Belanja Hibah	69.356.638.889,00	67.787.605.074,00	97,74
Belanja Bantuan Sosial	4.045.700.000,00	3.880.505.000,00	95,92



JUMLAH BELANJA OPERASI	719.419.336.562,00	687.446.840.346,00	95,56
BELANJA MODAL	231.751.715.027,50	173.815.317.057,00	75,00
Belanja Modal Tanah	3.819.583.000,00	693.705.000,00	18,16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.907.356.570,50	33.766.781.878,00	89,08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.446.567.216,00	49.065.319.012,00	93,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136.859.346.093,00	89.835.931.263,00	65,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.638.200,00	444.355.956,00	62,62
JUMLAH BELANJA MODAL	231.751.715.027,50	173.815.317.057,00	75,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
Belanja Tidak Terduga	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
BELANJA TRANSFER	168.175.463.667,00	168.175.463.667,00	100,00
Belanja Bagi Hasil	2.053.172.667,00	2.053.172.667,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	166.122.291.000,00	166.122.291.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	168.175.463.667,00	168.175.463.667,00	100,00
JUMLAH BELANJA	1.120.333.977.631,31	1.029.697.200.070,00	91,91
SURPLUS/DEFISIT	-52.233.935.634,14	-1.818.498.028,94	3,48
PEMBIAYAAN DAERAH	52.233.935.634,14	52.233.935.634,59	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.593.935.634,14	55.593.935.634,59	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.593.935.634,14	55.593.935.634,59	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.593.935.634,14	55.593.935.634,59	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	52.233.935.634,14	52.235.816.634,59	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	50.417.318.605,65	0,00

h. Pelaksanaan Program berdasarkan urusan Pemerintahan yang memuat alokasi anggaran dan realisasi belanja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pendidikan			
a		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	184.750.939.199	182.367.688.017



b		Program Pengelolaan Pendidikan	76.606.069.806	48.363.478.126
c		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.686.004.000	2.261.346.722
d		Program Pengembangan Kurikulum	150.000.000	86.935.000
e		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	227.500.000	208.025.000
2	Kesehatan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.247.987.616	60.456.880.596
b		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.607.879.328	59.354.955.505
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.551.813.000	7.293.621.347
b		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.885.719.000	10.595.162.520
c		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.337.440.000	19.466.892.632
d		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	75.000.000	0
e		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	163.300.000	145.519.748
f		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.557.327.000	2.347.270.000
g		Program Penataan Bangunan Gedung	7.521.280.409	4.985.066.682
h		Program Penyelenggaraan Jalan	63.808.751.000	49.628.294.313
i		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	136.000.000	71.106.040
j		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.000.000	48.730.000



3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.186.753.840	3.978.424.044
b		Program Pengembangan Perumahan	428.600.000	415.767.000
c		Program Kawasan Permukiman	1.204.855.700	1.157.076.262
d		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	857.547.050	833.827.050
e		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	82.000.000	56.850.000
4	Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.917.833.535	8.685.116.579
b		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.540.994.750	1.523.351.952
c		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	854.968.000	852.654.985
5	Sosial			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.355.997.953	3.233.003.773
b		Program Pemberdayaan Sosial	600.000.000	570.500.000
c		Program Rehabilitasi Sosial	596.263.500	595.726.875
d		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.805.903.900	1.723.697.030
e		Program Penanganan Bencana	65.000.000	62.750.000
6	Tenaga Kerja			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.375.773.660	3.242.931.610
b		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	123.721.000	123.721.000



c		Program Penempatan Tenaga Kerja	603.000.000	549.880.863
d		Program Hubungan Industrial	278.279.000	255.935.876
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.225.133.260	3.023.268.969
b		Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.586.801.424	2.377.670.860
c		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	677.436.780	620.317.925
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak			
a		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	208.232.000	206.566.200
b		Program Perlindungan Perempuan	186.425.000	164.017.500
c		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	95.300.000	95.212.400
d		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	340.931.000	326.433.000
e		Program Perlindungan Khusus Anak	175.800.000	157.340.900
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.798.004.000	3.673.912.677
b		Program Pengendalian Penduduk	146.400.000	145.336.200
c		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.919.454.000	2.853.919.445
5		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.455.400.000	1.382.754.668
10	Pangan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.084.822.000	2.987.010.300



b		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	14.000.000	14.000.000
c		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	989.518.000	988.069.700
d		Program Pengawasan Keamanan Pangan	80.000.000	80.000.000
11	Lingkungan Hidup			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.290.907.900	2.172.523.041
b		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	197.207.000,00
c		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30.005.940	27.415.940,00
d		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.722.000	39.722.000,00
e		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	19.350.000	19.350.000,00
f		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	96.750.000	96.643.131,00
g		Program Pengelolaan Persampahan	2.069.831.180	2.067.636.000,00
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.379.059.175	3.249.517.639
b		Program Pendaftaran Penduduk	157.604.000	157.350.000
c		Program Pencatatan Sipil	225.816.000	221.892.299
d		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.197.000	49.008.000
e		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000	19.200.000



13	Perhubungan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.180.233.625	3.989.454.566
b		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.562.210.000	2.532.272.942
c		Program Pengelolaan Pelayaran	1.503.600.000	1.442.330.000
14	Komunikasi dan Informatika			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.576.047.000	2.441.596.375
b		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	304.522.000	299.632.000
c		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.425.000.000	1.402.949.002
15	Penanaman Modal			
A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.116.581.820	3.962.885.089
B		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.350.000	74.317.000
C		Program Promosi Penanaman Modal	69.100.000	61.156.593
D		Program Pelayanan Penanaman Modal	157.145.165	135.038.165
E		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	654.768.000	632.353.000
F		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.000.000	29.488.000
16	Kepemudaan dan Olahraga			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.759.206.590	2.625.254.128
b		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.308.699.700	1.297.871.606,00
c		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.512.034.000	1.326.488.070,00
d		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	45.000.000	45.000.000,00



17	Kebudayaan			
a		Program Pengembangan Kebudayaan	645.000.000	194.680.000
b		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	919.938.000	841.440.093
18	Pertanahan			
a		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000	20.000.000
b		Program Penatagunaan Tanah	210.000.000	209.853.000
19	Pepustakaan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.283.847.500	3.148.623.274
b		Program Pembinaan Perpustakaan	1.222.150.500	1.212.817.551
20	Kearsipan			
a		Program Pengelolaan Arsip	20.000.000	20.000.000
21	Kelautan dan Perikanan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.981.422.000	3.788.553.274
b		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.267.286.450	7.906.324.548
c		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.035.154.000	1.961.346.387
d		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.535.459.550	1.499.434.301
22	Pertanian			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.981.422.000	3.788.553.274
b		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.267.286.450	7.906.324.548
c		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.035.154.000	1.961.346.387
d		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.535.459.550	1.499.434.301
23	Pariwisata			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.329.110.850	2.144.812.450
b		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	902.010.135	883.983.300
c		Program Pemasaran Pariwisata	125.950.000	125.521.000



d		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	218.799.625	217.582.625
e		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.037.592.329	975.430.179
24	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.940.470.560	3.776.606.378
b		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000	74.398.000
c		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	48.545.000	46.193.000
d		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	115.500.000	114.397.000
e		Program Pengembangan Umkm	49.500.000	44.899.000
25	Perdagangan			
1		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	589.000.000	588.350.000
2		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.364.911.000	1.361.487.000
3		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	15.000.000	15.000.000
26	Perindustrian			
a		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	199.999.900	183.407.460
b		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.995.000	4.545.000
c		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.000.000	41.295.000
27	Transmigrasi			
a		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	48.000.000	48.000.000
b		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	20.000.000	14.897.141
28	Sekretariat Daerah			



a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.559.748.861	21.926.850.441
b		Program Pemerintaha Dan Kesejahteraan Rakyat	6.147.656.000	6.147.656.000
c		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.179.574.700	1.172.770.080
29	Sekretariat DPRD			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.861.106.296	20.376.574.581
b		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11.818.523.925	11.218.629.152
30	Pengawasan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.500.290.000	6.274.183.766
b		Progra Penyelenggaraan Pengawasan	3.250.700.000	3.244.523.408
c		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	249.500.000	249.388.000
31	perencanaan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.229.693.830	6.009.378.534
b		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.293.995.000	1.198.660.851
c		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.057.193.500	973.917.648
32	Penelitiandan Pengembangan			
a		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.970.466.000	1.427.074.883
33	Keuangan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.039.526.850	19.737.243.055
b		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	171.712.751.341	170.829.215.247
c		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	797.402.200	789.460.200,00
34.A	Unsur Kewilayahan			



	(Kecamatan Buko)			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.041.223.000	1.927.756.056,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	20.000.000,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	50.000.000,00
34.B	Kec. Buko Selatan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.828.556.100	1.708.474.469,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	20.000.000,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.000.000	79.925.000,00
34.C	Kec. Bulagi			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.458.628.000	3.376.959.568,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	315.571.000	315.430.000,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	34.982.000,00
34.D	Kec. Bulagi Selatan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.838.852.000	1.759.210.383,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.400.000	29.400.000,00
c		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	4.550.000,00
d		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.100.000	41.100.000,00
34.E	Kec. Bulagi Utara			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.649.547.000	2.564.955.033,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	320.000.000	319.900.000,00



c		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	29.100.000	29.100.000,00
d		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.000.000	15.000.000,00
34.F	Kec. Liang			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.025.756.793	2.945.732.140,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.999.600	34.999.600,00
34.G	Kec. Peling Tengah			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.604.873.150	2.521.013.513,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.999.600	29.999.600,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000	70.000.000,00
d		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.982.000	3.982.000,00
34.H	Kec. Tinangkung			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.561.795.881	2.450.481.197,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	312.579.045	312.579.045,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000	70.000.000,00
34.I	Kec. Tinangkung Selatan			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.721.578.000	1.600.299.404,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.545.000	28.545.000,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	829.700.000	750.140.000,00
d		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.700.000	2.700.000,00



34.J	Kec. Tinangkung Utara			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.940.588.000	1.855.026.476,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000,00
34.K	Kec. Totikum			
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.489.830.100	2.410.614.393,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	40.000.000,00
d		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000,00
34.L				
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.372.462.699	2.254.131.719,00
b		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.900.000	28.900.000,00
c		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	47.085.000	47.085.000,00
d		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Berdasarkan evaluasi hasil capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dan lima tahunan serta kondisi eksisting yang terjadi di tengah masyarakat yang dijaring melalui penyampaian aspirasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan mulai konsultasi publik, musrenbang kecamatan dan kabupaten di rumuskan dan disepakati permasalahan sebagai berikut :

1. Perekonomian

Penanggulangan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024



dibidang perekonomian. Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,35%. Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2021 sebesar 12,74%. masih cukup tinggi, sehingga di Tahun 2024 perlu dilakukan upaya penanggulangan dengan melibatkan sektor-sektor terkait.

2. Kualitas SDM

Pencapaian IPM Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021 baru mencapai 70,41%. Pencapaian ini tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Komponen IPM mencakup Harapan Lama Sekolah dengan capaian sebesar 12,44 Tahun, Rata-rata Lama sekolah sebesar 7,11 tahun, dan Usia Harapan Hidup: 74,84 tahun, dan pendapatan perkapita yang disesuaikan sebesar 10,294 juta rupiah pada tahun 2021. Ditahun 2024, peningkatan dan pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan. Kualitas SDM juga diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian sebesar 86,14%

3. Kualitas Infrastruktur

Pada tahun 2021, pencapaian persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik : 79,82%, persentase drainase kondisi baik: 64,14%, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak 85,09%, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak: 76,87%, persentase areal irigasi terairi dengan baik 85,12%, persentase pelayanan pengangkutan sampah khususnya di wilayah perkotaan : 40% dan persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 26,45%. Ditahun 2024, infrastruktur masih menjadi salah satu isu pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Utamanya dalam pembangunan jalan dan penataan kawasan ibukota yang menjadi target capaian pembangunan di tahun 2024.

4. Penurunan Angka Stunting

Tingginya angka stunting masih menjadi isu penting yang menjadi prioritas untuk diatasi ditahun 2024 dimana pada tahun-tahun sebelumnya, angka stunting tahun 2020 sebesar 23% kemudian menurun menjadi 21,54% ditahun 2021. Ditahun 2020 juga ada 7 kecamatan yang menjadi lokus utama pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, dan Kecamatan Buko Selatan yang tersebar di 15 desa, sementara



ditahun 2021 lokus pencegahan dan penurunan angka stunting tersebar di 9 kecamatan, lebih spesifik lagi di 25 desa. Ditahun 2024 pencegahan dan penurunan angka stunting masih menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan target angka stunting menurun hingga sebesar 13,7%.

5. Pelaksanaan Pemilu Serentak

Tahun 2024 pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden serta pemilu kada serentak yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi salah satu isu dan prioritas dalam perencanaan tahun 2024, untuk mensukseskan agenda pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kada ditahun 2024 ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah berupaya mengalokasikan penganggagannya.

b. Visi dan Misi

- **Visi RPJPD Kabupaten Banggai kepulauan**

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu :

**" Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing,
Sejahtera dan Merata "**

Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat menjadi daerah yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang adil, aman dan Makmur, untuk mewujudkan pemerataan hasil pemabngunan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai gambaran dan harapan yang ingin diwujudkan oleh RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2005-2025, pada hakekatnya mengandung makna dengan Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

- **Misi Kabupaten Banggai Kepulauan**

Untuk mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2005-2025 maka Misi Kabupaten Banggai Kepulauan dijabarkan yaitu :

1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Baik (Good Governance) dan Reformasi Biokrasi Daerah yang Melayani.



2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang daya saing daerah melalui Pendidikan dan Kesehatan yang merata.
3. Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur daerah.
4. Mewujudkan perekonomian daerah inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

• **Tema Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan**

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, isu strategis serta permasalahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrsatruktur yang mendukung Daya Saing daerah”**. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melalui penekanan fokus pembangunan pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritas yang telah ditetapkan.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan

Program pembangunan daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPD. Program prioritas di RPJMD secara umum bagian dari janji politik kepala daerah beserta visi dan misinya. Jika tidak ada program prioritas sebagai janji politik, maka cara merumuskan program prioritas di dalam dokumen RPD berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran RPD. Berikut adalah seluruh program prioritas daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah:

Tabel 1.15
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	BB	Strategi: Peningkatan Pengawasan, akuntabilitas kinerja Pemerintah	▪ Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	✓ Seluruh Perangkat Daerah;



Daerah				Daerah. Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Implementasi SAKIP; ▪ Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); ▪ Peningkatan Kapabilitas aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 	/ kota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyelenggaraan Pengawasan ▪ Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inspektorat ✓ Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	WTP	Strategi: Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan daerah Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengelolaan keuangan daerah ▪ Program pengelolaan barang milik daerah ▪ Program pengelolaan pendapatan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BPKAD ✓ BPKAD ✓ Bapenda
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	N/A	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengelolaan barang milik daerah ▪ Program pengelolaan pendapatan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bapenda
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	81-90	Strategi: Meningkatkan profesionalitas ASN Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan disiplin ASN; ▪ Peningkatan pembinaan pegawai; ▪ Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional; ▪ Penempatan jabatan berbasis sistem merit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program kepegawaian daerah ▪ Program pengembangan sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BKPSDM ✓ BKPSDM
Meningkatnya Kualitas	Indeks Perencanaan	N/A	Tinggi	Strategi: Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat Daerah dengan perangkat Daerah; ▪ Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan; ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ▪ Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bappeda dan Litbang ✓ Bappeda dan Litbang
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Strategi: Peningkatan indeks inovasi daerah Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan hasil penelitian; ▪ penguatan kembali Laboratorium Inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penelitian dan pengembangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bappeda
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	Baik	Strategi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik ▪ Penguatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah. ▪ Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. ▪ Peningkatan database 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik ▪ Program pendaftaran penduduk ▪ Program pencatatan sipil ▪ Program Pelayanan Penanaman Modal ▪ Program Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan ✓ Disdukcapil ✓ Diskominfo ✓ DPMP2TSP



				<p>kependudukan dan catatan sipil yang valid dan update;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil. 	<p>Dan Komunikasi Publik</p>	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	66,31	68,53	<p>Strategi: Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu.</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan; ▪ Peningkatan ketersediaan obat dan logistik kesehatan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ▪ Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 	<p>✓ Dinkes</p> <p>✓ Dinkes</p>
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan capaian SPM Kesehatan; ▪ Penyediaan tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemberdayaan masyarakat kesehatan 	<p>✓ Dinkes</p>
Meningkatkan kualitas	Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,44	9,14	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 9 tahun. ▪ Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ▪ Peningkatan program wajib belajar 9 tahun ▪ Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengelolaan pendidikan ▪ Program pengembangan kurikulum ▪ Program pendidik dan tenaga kependidikan 	<p>✓ Dikbud</p> <p>✓ Dikbud</p> <p>✓ Dikbud</p>
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	71,79	79,97	<p>Strategi: Penguatan peran perempuan dalam kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Arah Kebijakan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan 	<p>✓ DP3</p>
Meningkatnya pemerataan	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	58	78,83	<p>Strategi: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan secara berkala untuk konektivitas wilayah serta penanganan pemeliharaan secara responsive.</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penyelenggaraan jalan 	<p>✓ Dinas PUPR</p>
Meningkatnya cakupan akses air minum	Persentase Penduduk berakses air minum	50,46	75,69	<p>Strategi: meningkatkan cakupan akses air minum melalui peningkatan pelayanan PDAM, PAMSIMAS</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan cakupan akses ketersediaan air minum bagi rumah tangga pada semua wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	<p>✓ Dinas PUPR</p>



Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya kawasan kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	75,40	82,94	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penataan kawasan kumuh perkotaan <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpeghasilan rendah penetaan kawasan kumuh perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan perumahan Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Meningkatnya cakupan rumah Tangga memiliki sanitasi layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi	61,81	77,25	<p>Strategi:</p> <p>Meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), serta pemberian sosialisasi tentang sanitasi layak</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <p>Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas PUPR
Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Cakupan layanan telekomunikasi	76	83,6	<p>Strategi:</p> <p>Meningkatkan penyediaan BTS jaringan telekomunikasi dan informasi diseluruh wilayah yang masih mengalami <i>blank spot</i></p> <p>Arah Kebijakan:</p> <p>Peningkatan koordinasi penyediaan BTS jaringan telekomunikasi dan informasi diseluruh wilayah yang masih mengalami <i>blank spot</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Program informasi dan komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diskominfo
Tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar	Jumlah pelabuhan laut	13	14	<p>Strategi:</p> <p>Menyediakan pelabuhan laut yang memenuhi standar</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/ pelayaran untuk mendukung konektivitas antar wilayah Peningkatan penyediaan perlengkapan transportasi laut Peningkatan koordinasi pembangunan pelabuhan laut 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan pelayaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dishub
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar petani	N/A		<p>Strategi:</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan petani/ nelayan</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sektor pertanian Peningkatan pembinaan kelompok petani / nelayan. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas Perikanan



					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengolahan Dan Pemasaran 	
Meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan			<p>Strategi: Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</p> <p>Arah Kebijakan: Peningkatan pertumbuhan PDRB pada sector Pertanian dan perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; ▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; ▪ Program Penyuluhan Pertanian ▪ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ▪ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; ▪ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas Perikanan
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	61,9	90	<p>Strategi: Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan</p> <p>Arah Kebijakan: Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses, dan penganekaragaman pangan serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	12,35	18,08	<p>Strategi: Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata serta penguatan kelembagaan pariwisata</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan promosi destinasi wisata ▪ Peningkatan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif ▪ Pengembangan Masyarakat sadar wisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ▪ Program pemasaran pariwisata ▪ Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Pariwisata
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	2,55	3,73	<p>Strategi: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri</p> <p>Arah Kebijakan: Peningkatan jumlah industri kecil menengah (IKM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan dan pengembangan industri ▪ Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota ▪ Program pengelolaan system informasi industry nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disperindagkop



d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, isu strategis serta permasalahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang mendukung Daya Saing daerah”**. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melalui penekanan fokus pembangunan pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritas yang telah ditetapkan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 yaitu:

1. Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu;
2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata;
3. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal;
4. Percepatan intervensi penurunan stunting; dan
5. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilukada yang berkualitas.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10-7,10 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,85 – 1,00 %;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,235 – 0,255;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 67,39 – 68,75; dan
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,15 – 11,99 %;

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Rencana Program / Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana pelabuhan Salakan dan penataan kawasan ibukota	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	13 Buah	Program Pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12%	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks	Program Penyelenggaraan	Dinas PUPR



					Jalan	
			Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas	27,83 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
			Panjang kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai	4,2 KM	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
			Jumlah Bangunan Gedung yang ber IMB	895	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	90,99 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
			Jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	95 Orang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
			Panjang wilayah yang tidak mengalami genangan	1,8 KM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
			Tingkat Pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan	100,00 %	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
			Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang Terpelihara	2 Kawasan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
			Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	90,00 %	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase Drainase berfungsi baik	100,00 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42 %	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	4,00 %	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04 %	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunkasi dan Informatika
2	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,55 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MInum	Dinas PUPR
		Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	67,99 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
3	Peingkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi Percepatan Penurunan Stunting	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Usia 5-6 tahun dalam pendidikan Usia Dlni	99,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	99,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 12-15 tahun dalam pendidikan Menengah Pertama	72,59	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Pendidik	85	Program Pendidik dan	Dinas Pendidikan



			dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma (D.IV), S1 dan Sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal		Tenaga Kependidikan	dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, makanan dan minuman	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
			Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	86	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	100	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Keluarga pra Sejahtera ke Keluarga Sejahtera	Program Pemberdayaan-an dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
4	Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Baik	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian,	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,	3,75	Program Penyediaan dan	Dinas Pertanian



		Kehutanan, dan Perikanan	Kehutanan, dan Perikanan		Pengembangan Sarana Pertanian	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	68,5 Indeks	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	
5	Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilukada yang berkualitas	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 Persen	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan Pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bahwa SPM adalah Ketentuan Tentang Jenis dan mutu



Pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara Minimal. Penekanan kata "Minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap Daerah.

Dalam penerapan SPM Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Daerah menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Standar Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang no 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target Tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPD Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan arah kebijakan melalui rangkaian program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menetapkan surat Keputusan no 176 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten banggai Kepulauan.



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Menggunakan indikator kinerja makro yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,05	67,65	0,89
2	Angka Kemiskinan	12,90	12,32	-4,49
3	Angka Pengangguran	1,56	1,55	-0,64
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,99	4,03	1,00
5	Pendapatan Perkapita	39,94	47,17	18,10
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,272	0,276	1,47

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024
Badan Pusat Statistik Prov. Sulteng

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Indeks (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran usia harapan hidup, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar 67,65 poin Mengalami perubahan yaitu naik 0,89 % dari tahun 2023 yang berada pada angka 67,05 poin.



2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Angka kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 mencapai 12,32 Ribu Jiwa, mengalami penurunan 4,49 % dari tahun 2023 yang berada pada angka 12,90 Ribu Jiwa.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Angka pengangguran di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 mencapai 1.55 Ribu Jiwa mengalami penurunan sebesar 0,64 % dari tahun 2023 yang berada pada angka 1,56 Ribu Jiwa

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik. Ekonomi suatu Daerah sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 sebesar 4,03 mengalami peningkatan 1,00 % dari tahun 2023 yang berada pada angka 3,99.

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah total penghasilan suatu Daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk daerah tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin makmur. Pendapatan perkapita Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 sebesar 47,17 mengalami peningkatan 18,10 % dari tahun 2023 yang berada pada angka 39,94.



6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 sebesar 0,276 mengalami peningkatan 1,47 % dari tahun 2023 yang berada pada angka 0,272.



LAMPIRAN

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (Tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2024 sesuai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah. Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2022. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ini bertujuan untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama 2024 disusun berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah 2023 – 2026.

Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengacu pada IKU Tahun 2023 – 2026, RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026, Renstra OPD dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Penetapan Target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	1
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	66,12
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	1,48
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	78,42
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	%	100
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	%	79,04
6	Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	70
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	80
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	100
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	%	100
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	B
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	7.60
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	%	79,5
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,75
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	2,81
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68,5
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	Indeks	68,5



NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET 2024
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	%	100

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dengan target perjanjian berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan
dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	1	1	100%
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	66,12	35,27	53,34%
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	1,48	3,29	222%
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	78,42	73,98	94,34%
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	%	100	17,17	17,17%
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	%	79,04	134	170%



NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN 2024
6	Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	70	100	143%
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	80	100	125%
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	100	74,93	74,93%
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	%	100	78,81	78,81%
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	100%
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	7.60	7,35	97%
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	%	79,5	81,24	102%
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,75	2,48	66.13%
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	2,81	2,21	79%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76	67	87,50%
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68,5	70,00	102,19%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,5	95,07	100,60%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	Indeks	68,5	57,97	84,63%
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	159,41	98%
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	%	100	74,73	74,73%

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan
dengan Tahun Sebelumnya
2023-2024

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	1	1
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	87	35,27
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,89	3,29
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	-	73,98
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	%	16	17,17
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	%	160	134
6	Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	102	100
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	103	100
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	73	74,93
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	%	76	78,81
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	5,33	7,35
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	%	76	81,24
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,19	2,48
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	1,90	2,21
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	54	67
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	102,19	70,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	98,57	95,07
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	Indeks	66,67	57,97



NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	159,41
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	%	74,73	74,73

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada beberapa indikator namun juga mengalami penurunan pada indikator yang lain. Namun secara umum rata – rata capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

- d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah
Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target dalam RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPD 2023-2026 Kabupaten Banggai Kepulauan

No	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RPD 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	13	1	7,69%
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	70,18	35,27	50,88%
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	1,86	3,29	176,88%
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	79,92	73,98%	92,56%
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	%	71,08	17,17%	24,15%
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	%	80,56	134%	166,33%



No	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RPD 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN 2024
6	Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	65,6	100	152,43%
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	71,08	100	140,68%
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	8,89	74,93	842,85%
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	%	67,71	78,81	116,39%
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	100%
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	14,94	7,35	49,19%
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	Indeks	80	81,24	101,55%
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4,13	2,48	60,04%
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	3,09	2,21	71,52%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80	67	83,75%
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	69	70	107,69%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	95	95,07	100,07%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	Indeks	69	57,97	84,01%
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	144	159,41	110,70%
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	%	0,00	74,73	100%



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 226.31.975.339,-, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 259.603.679.092,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 87.17%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi,yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisahkan anggaran.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 18 program. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah in :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Kepegawaian Daerah,
4. Program Pendaftaran Penduduk
5. Program pengelolaan pendidikan
6. Program Pendidikan dan tenaga kependidikan
7. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan dan upaya Kesehatan masyarakat.
8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
10. Program Pengembangan sarana Pertanian
11. Program Pembangunan Prasarana Pertanian
12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
13. Pemberdayaan Perikanan Budi daya
14. Program kawasan pemukiman
15. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Tugas Pembantuan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah



Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menerima Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Provinsi.

3. Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terlaksana.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota Kabupaten Banggai Kepulauan Tidak Mendapat Tugas Pembantuan Dari Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1.1 Target Kinerja

3.1.2 Realisasi

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Banggai Kepulauan Tidak Mendapat Tugas Pembantuan Dari Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.1 Target Kinerja

3.2.2 Relisasi

3.3 Permasalahan dan Kendala

Pada umumnya Pelaksanaan tugas pembantuan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi permasalahan yang sama yaitu kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah yang melaksanakan dengan instansi pemberi dana tugas pembantuan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring sampai evaluasi kegiatan antara instansi pemberi bantuan dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian

Indikator Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan (PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018).

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan PAUD	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penduduk Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)2. Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang telah mencapai perkembangan anak usia pradasar (sesuai dengan 6 aspek perkembangan anak 5-6 Tahun dalam standar Permendikbud Permendikbud 32 Tahun 2022	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
4.	Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	Setiap Tahun



4.1.3 Realisasi

No.	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target dalam tahun	Presentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini :			
	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	4.939	4.939	100 %
	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Penerima Layanan Dasar			
	a. Angka parsitipasi Sekolah	50.37%	50.37%	100%
	b. Angka Partisipasi Murni	46.58%	46.58%	100%
	c. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	34.22%	34.22%	100%
	d. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV)	26.68%	26.68%	100%
	e. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0.12%	0.12%	100%
	f. Kecukupan formasi guru ASN	48.42%	48.42%	100%
	g. Indeks distribusi guru	5.34%	5.34%	100%
	h. Proporsi PTK bersertifikat	3.27%	3.27%	100%
i. Proporsi PTK penggerak	0.98%	0.98%	100%	
2.	Pendidikan Dasar (SD) :			
	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	18.150	8.150	100%
	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Penerima Layanan Dasar			
	SD			
	a. Angka parsitipasi Kasar	94%	94%	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	99.75%	99.75%	100%
	c. Kemampuan Literasi	3.41	3.41	100%
	d. Kemampuan numerasi	42.56	42.56	100%
	e. Perbedaan Skor Literasi	122.95	122.95	100%
	f. Perbedan Skor numerasi	4.49	4.49	100%
	g. Indeks Iklim Keamanan	75.04	75.04	100 %
	h. Indeks Iklim kebhinekaan	74.37	74.37	100%
	i. Indeks Iklim inklusivitas	57.09	57.09	100%
i. Kecukupan formasi Guru ASN	48.43%	48.43%	100%	
j. Indeks distribusi Guru	0.38%	0.38%	100%	



	k. Proporsi PTK bersertifikat	36.52%	36.52%	100%
	l. Proporsi PTK Penggerak	0.13%	0.13%	100%
	SMP			
	a. Angka parsitipasi Kasar	96%	96%	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	97.55%	97.55%	100%
	c. Kemampuan Literasi	62.71	62.71	100%
	d. Kemampuan numerasi	57.22	57.22	100%
	e. Perbedaan Skor Literasi	3.53	3.53	100%
	f. Perbedan Skor numerasi	5.51	5.51	100%
	g. Indeks Iklim Keamanan	73.51	73.51	100%
	h. Indeks Iklim kebinekaan	76.62	76.62	100%
	i. Indeks Iklim Inklusivitas	64.85	64.85	100%
	i. Kecukupan formasi Guru ASN	35.11%	35.11%	100%
	j. Indeks distribusi Guru	0.34%	0.34%	100%
	k. Proporsi PTK bersertifikat	2.67%	2.67%	100%
	l. Proporsi PTK Penggerak	0.21%	0.21%	95.24%
	Pendidikan Kesetaraan :			
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	1.943	1.943	100%
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Penerima Layanan Dasar			
	a. Angka parsitipasi Kasar	19.96%	19.96%	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	19.96%	19.96%	100%
	c. Kemampuan Literasi	37.5	37.5	100%
	d. Kemampuan numerasi	34.38	34.38	100%
3.	e. Perbedaan Skor Literasi	16.15	16.15	100%
	f. Perbedan Skor numerasi	14.4	14.4	100%
	g. Indeks Iklim Keamanan	65.14	65.14	100%
	h. Indeks Iklim kebhinekaan	64.35	64.35	100%
	i. Indeks Iklim inklusivitas	52.13	52.13	100%
	j. Kecukupan formasi Guru ASN	0	0	0%
	k. Indeks distribusi Guru	0	0	0%
	l. Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0%
	n. Proporsi PTK Penggerak	0	0	0%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:



1. Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu Rp.265.985.451.005
2. Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu Rp.76.606.069.806 yang terdiri dari:
 - a) APBD DAU dengan Pagu Rp.42.884.248.300
 - b) APBD DAK FISIK dengan Pagu Rp.10.918.895.454
 - c) APBD DAK NON FISIK dengan Pagu Rp.22.802.926.052

4.1.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 62 orang, terdiri Pejabat struktural 15 orang, Fungsional 12 orang dan pelaksana 35 orang.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain adalah belum maksimalnya Pengumpulan data yang belum sempurna dan Alokasi Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya peran Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Dasar khususnya urusan pelayanan dasar agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

4.1.7 Program kegiatan

A. Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD pada :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
4. Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
5. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
8. Pengelolaan Dana BOP PAUD

B. Program SPM Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU



2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 9. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 10. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 11. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 12. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
 13. Pemeliharaan Mebel Sekolah
 14. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 15. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 16. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 17. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 19. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 20. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 21. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 22. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 23. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 24. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 25. Pengadaan Mebel Sekolah
 26. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 27. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 28. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 29. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 30. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 31. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- C. Program SPM Pendidikan Dasar
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan
1. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan



2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Nomor 4//2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua Belas) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

- Pelayann Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)

4.2.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	100	2024



2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	2024
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2024
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100	2024
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	100	2024
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	2024
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	2024
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	80	2024
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	80	2024
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif	100	2024



		preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	90	2024
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	2024

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Persentase
	2	3	4	6
1.	Jumlah ibu hamil yang mendpatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	2.422	1.940	80.10%
	1. Vaksin Tetanus Differi (Td)	2.422	1.940	80.10%
	2. Tablet tambah darah	2.422	1.940	80.10%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2.422	1.940	80.10%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2.422	1.940	80.10%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2.422	1.940	80.10%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2.422	1.940	80.10%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining Triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	2.422	1.940	80.10%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	2.422	1.940	80.10%
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.422	1.940	80.10%
	10. Media Promosi Komunikasi Informasi	2.422	1.940	80.10%



	dan Edukasi (KIE)			
	11. Gel USG	14	14	100%
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi	16	16	100%
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	16	16	100%
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan	30	30	100%
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	16	16	100%
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	2.422	1.096	45.25%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	2.312	1.470	63.58 %
	a. Formulir Partograf	2.312	1.470	63.58%
	b. Kartu ibu/rekam medis ibu	2.312	1.470	63.58%
	c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.312	1.470	63.58%
	d. Media promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	2.312	1.470	63.58%
	e. Dokter/dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi	16	16	100%
	f. Bidan	30	30	100%
	g. Perawat	16	16	100%
	h. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	i. Tenaga Gizi	16	16	100%
3.	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.221	1.563	70.37%
	a. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	2.221	1.563	70.37%
	b. Vitamin K1 injeksi	2.221	1.563	70.37%
	c. Salep/tetes mata antibiotik	2.221	1.563	70.37%
	d. Formulir bayi baru lahir	2.221	1.563	70.37%
	e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2.221	1.563	70.37%
	f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.221	1.563	70.37%



	g. Media Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	2.221	1.563	70.37%
	h. Dokter/dokter spesialis Anak	16	16	100%
	i. Bidan	30	30	100%
	j. Perawat	16	16	100%
	k. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	l. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	16	16	100%
	m. Tenaga Gizi	16	16	100%
	n. Kader Kesehatan	14	14	100%
4.	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	10.422	9.165	87.94%
	a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	10.422	9.165	87.94%
	b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	10.422	9.165	87.94%
	c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	10.422	9.165	87.94%
	d. Vitamin A Biru	10.422	9.165	87.94%
	e. Vitamin A Merah	1.293	1.293	100%
	f. Vaksin imunisasi dasar: BCG	1.293	1.293	100%
	g. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	1.293	1.293	100%
	h. Vaksin imunisasi dasar: IPV	1.293	1.293	100%
	i. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	1.293	1.293	100%
	j. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	1.293	1.293	100%
	k. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	1.293	1.293	100%
	l. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	1.293	1.293	100%
	m. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1.293	1.293	100%
	n. Peralatan Anafilaktik	10.422	9.165	87.94%
	o. Formula Terapi Gizi Buruk	10.422	9.165	87.94%
	p. Tenaga kesehatan : Dokter	16	16	100%
	q. Tenaga kesehatan : Bidan	30	30	100%
	r. Tenaga kesehatan : Perawat	16	16	100%
	s. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	16	16	100%
	t. Guru PAUD	14	14	100%



	u. Kader Kesehatan	14	14	100%
5.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	a. Buku raport kesehatanku	5.085	4.833	95.04%
	b. Buku pemantauan kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	c. Kuesioner skrining kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	5.085	4.833	95.04%
	e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	5.085	4.833	95.04%
	f. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluat sekolah	5.085	4.833	95.04%
	g. Alat pemeriksaan Hb	5.085	4.833	95.04%
	h. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	5.085	4.833	95.04%
	i. Media promosi kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	j. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	269	269	100%
	k. Dokter/Dokter gigi	16	16	100%
	l. Bidan	30	30	100%
	m. Perawat	16	16	100%
	n. Tenaga gizi	16	16	100%
	o. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	p. Tenaga Kesehatan masyarakat	16	16	100%
	q. Guru	14	14	100%
	r. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	14	14	100%
6.	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	79.163	42.562	53.77%
	a. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	14	14	100%
	b. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	14	14	100%
	c. Tensimeter	14	14	100%



	d. Glukometer	14	14	100%
	e. Alat Pemeriksaan Hb	79.163	42.562	53.77%
	f. Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alcohol	14	14	100%
	g. KIT IVA Tes	20.893	2.800	13.40%
	h. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	79.163	42.562	53.77%
	i. Kit Opthamologi Komunitas	79.163	42.562	53.77%
	j. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/ PPOK)	79.163	42.562	53.77%
	k. Alat Pelayanan KB			
	a) Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	5.115	2.991	58.48%
	b) Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	1.023	997	97.46%
	c) Vasectomi Set	1.023	997	97.46%
	l. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1.023	997	97.46%
	m. Vaksin Tetanus Differi (td)	79.163	42.562	53.77%
	n. Dokter	950	950	100%
	o. Bidan	16	16	100%
	p. Perawat	30	30	100%
	q. Tenaga Gizi	16	16	100%
	r. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	s. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%
7.	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	26.535	20.991	79.11%
	a. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	26.535	20.991	79.11%
	b. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	26.535	20.991	79.11%
	c. Alat pemeriksaan kolesterol	26.535	20.991	79.11%
	d. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan	26.535	20.991	79.11%



	kolesterol, lancet, kapas alkohol			
	e. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel)	26.535	20.991	79.11%
	f. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	26.535	20.991	79.11%
	g. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26.535	20.991	79.11%
	h. Dokter	16	16	100%
	i. Bidan	16	16	100%
	j. Perawat	16	16	100%
	k. Tenaga Gizi	16	16	100%
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	m. Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%
8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27.561	17.554	63.69%
	a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	28	28	100%
	b. Obat Hipertensi	5	3	60.00%
	c. Tensimeter	14	14	100%
	d. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1.837	14	0.76%
	e. Media Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	14	14	100%
	f. Dokter	16	16	100%
	g. Bidan	16	16	100%
	h. Perawat	16	16	100%
	i. Tenaga Gizi	16	16	100%
	j. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	14	14	100%
	k. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
9.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan	2.021	2.002	99.06 %



	kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun			
	a. Obat Diabetes Melitus	5	3	60.00%
	b. Fotometer atau Glukometer	42	42	100%
	c. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alcohol, lancet	81	81	100%
	d. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	202	202	100%
	e. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	42	28	66.67%
	f. Dokter			
	g. Bidan	16	16	100%
	h. Perawat	16	16	100%
	i. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	j. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	k. Tenaga Gizi	16	16	100%
	l. Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	16	16	100%
10.	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	222	205	92.34%
	a. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	14	14	100%
	b. Penyediaan Psikofarmaka	11	7	63.64%
	c. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	82.683	2.519	3.05%
	d. Penyediaan Formulir pencatatan dan	342	342	100%



	pelaporan melalui system informasi kesehatan			
	e. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	222	205	92.34%
	f. Dokter	16	16	100%
	g. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	16	16	100%
	h. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	16	16	100%
	i. Tenaga professional lainnya	14	14	100%
11.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.212	1.601	72.38%
	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.212	2.212	100 %
	b. Reagen Zn TB	138	100	72.46 %
	c. Masker bedah dan Masker N95	866	854	98.61 %
	d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	4.424	3.202	72.38 %
	e. Catridge tes cepat molekuler	2.212	1.601	72.38 %
	f. Formulir pencatatan dan pelaporan	111	80	72.07 %
	g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	16	16	100 %
	h. Tuberkulin	48	4	8.33%
	i. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	20	18	90.00%
	j. Perawat	18	18	100%
	k. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	m. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	16	16	100%
	n. Radiografer	2	2	100%
	o. Tenaga non kesehatan terlatih	70	70	100%
12.	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	3.138	1.916	61.06 %



a. Media Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	3.138	1.916	61.06%
b. Tes cepat HIV/ Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	3.138	1.916	61.06%
c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3.138	1.916	61.06%
d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3.138	1.916	61.06%
e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	16	16	100%
f. Bidan			
g. Perawat			
h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	16	16	100%
i. Tenaga kesehatan masyarakat	16	16	100%
j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:	16	16	100%
Pendamping dan Penjangkauan	14	14	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran

1. APBD

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Langsung sebesar Rp133.042.296.608

b. Anggaran SPM

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan SPM sebesar Rp 1.051.929.666

4.2.5 Dukungan Personil

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda seperti: Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran, Ilmu Kefarmasian, Ilmu Keperawatan, Ilmu Kebidanan, Ilmu elektromedik, dan Umum. Namun dengan



demikian dengan perbedaan tersebut lebih bersinergi dengan baik maka menghasilkan kekuatan personalia yang dapat mendukung tercapainya banggai kepulauan yang sehat. Dengan Komposisi jumlah PNS yang ada di Kantor Dinas Kesehatan pejabat Struktural 9 orang, Fungsional 23 Orang dan pelaksana 16 Orang.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan secara baik, berhasil dan maksimal dipersiapkan solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu

- Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Adanya program Indonesia sehat melalui pendekatan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Adanya Kebijakan Pengalokasian Anggaran bidang Kesehatan Minimal 10% dari Total APBD sesuai amanat undang-undang 36 tahun 2009
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Tersedianya sumberdaya manusia kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Adanya desentralisasi bidang Kesehatan
- Adanya Dukungan Masyarakat dalam implementasi program Kesehatan
- Penambahan Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi Pendidikan
- Pendidikan dan Pelatihan teknis tenaga Kesehatan
- Efisiensi Penggunaan Dana

4.2.7 Program dan Kegiatan

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut



- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Pelayanan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari a. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) b. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) c. Jaringan perpipaan d. Jaringan bukan perpipaan	100 %	2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	2. Tersedianya sistem saluran Sanitasi dan air limbah setempat yang memadai skala komunitas/ kawasan/kota (pembangunan MCK++ dan Tangki Septik Skala Komunal) a. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik b. Kualitas pelayanan air limbah domestik c. Sub-Sistem pengolahan setempat d. Sub-sistem pengangkutan e. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) f. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	100 %	2024



4.3.3 Realisasi

No.	Jenis Pelayanan	SASARAN	REALISASI	PRESENTASI
1.	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1.030	1.030	100%
	b. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidakberasa, tidakberbusa, tidak berbau	1.030	1.030	100 %
	c. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga	0	0	0%



	<p>yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM</p> <p>d. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau</p>	0	0	0%
2.	<p>1. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti</p> <p>a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah</p>	31.226	29.308	93.86%



	<p>Domestik</p> <p>b. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual lbagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25(dua puluh lima) jiwa per hektardan/atau d iseluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkap itangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT;dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T</p> <p>c. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bag imasyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk</p>	0	0	0%
		0	0	0%



	kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			
--	---	--	--	--

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya Pekerjaan Umum yang bersifat pelayanan urusan bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti adalah :

1. APBD

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Langsung sebesar Rp114.086.630.409

b. Anggaran SPM

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan SPM sebesar Rp 21.500.740.000

4.3.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan terdiri dari 62 orang terdiri dari Pejabat Struktural 10 orang, fungsional 12 dan fungsional 40 orang.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian



tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

4.3.7 Program dan Kegiatan

A. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Sistem Pengolahan air Limbah Domestik

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota



4.4.2 Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	a. Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	2024
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	b. Tersedianya Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	2024

4.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	3	3	3	100%
-	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	0
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		0	0	0
	c. Pemukiman kembali ibagi korban bencana		0	0	0
	d. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		3	3	100%
2.	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak ada relokasi			
-	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0
	b. Subsidi uang sewa	0	0	0	0
	c. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0



4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat :

- Rp.248.600.000

4.4.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 21 orang, terdiri Pejabat struktural 9 Orang, fungsional 5 orang dan pelaksana 7 orang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para Pemangku Kebijakan (Stakeholder) sebagai bentuk mewujudkan pelaksanaan prioritas program pemerintah baik itu urusan wajib maupun urusan penunjang lainnya. Serta minimnya anggaran yang teralokasikan juga sebagai faktor utama pelaksanaan kegiatan dikarenakan Bidang Urusan Perumahan bukan termasuk dalam indikator tingkat kinerja daerah sesuai petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya (DAU-SG).
- Tidak mempunyai Baseline Data (informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai) penanganan rumah layak huni bagi korban Bencana sehingga belum bisa merencanakan target yang akan ditangani di tahun 2024
- Belum adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan Daerah sehingga baik perencanaan maupun realiasi belum ada

a. Solusi

Solusi dalam mengatasi masalah perumahan rakyat adalah menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta mengakomodir anngarannya, khususnya pada Bidang Perumahan agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

4.4.7 Program dan Kegiatan

A. Program Pengembangan Perumahan



Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Perumahan :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - Pengumpulandata rumahkorban bencana kejadian sebelumnya yang belumtertangani
 - Pendataantingkat kerusakanrumah akibat bencana
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - Pembangunan rumahbagikorban bencana

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum adalah Tolak ukur Kuantitatif dan kualitatif Bidang ketentraman dan ketertiban umum yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang tercantuk dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan Dasar.

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pelayanan Ketentraman dan ketertiban	100%	2024
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	100 %	2024



4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2024
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	2024

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Perelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		129.000	129.00	100%
-	a. Standar sarana prasarana Satpo IPP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada		59	59	100%
	b. Standar Operasional Prosedur(SOP)Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*		1	1	100%
	c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpo IPP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakanperdadanperkada/PNS yangtelahlulusdiklat dasar SatpolPP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***.		202	202	100%
	d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibatpenegakanhukum pelanggaranPerdadan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasidenganperangkatdaerayangmembangkepududukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal		1	1	100%
	e. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		10	10	100%
	f. Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengobatan		0	0	0%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		129.000	129.000	100%



-	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	100%
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	1	100%
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	47	47	100%
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	0	0	0%
	e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2	2	100%
	f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0	0	0%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang ketentraman, Ketertiban Umum :

- Ketentraman ketertiban Umum Rp. 882.212.700
- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Rp. 683.694.015

4.5.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan



didukung 33 orang. terdiri Pejabat Struktural 19 orang, fungsional 6 orang dan pelaksana 8 orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Minimnya jumlah anggota yang memiliki SDM sehingga berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional dan penertiban
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten banggai Kepulauan
3. Kurangnya Koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perda dengan instansi terkait
4. Tidak tersedianya Sub program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan dasar SPM dan Sub Program Kegiatan Penegakan Non yustisial dan terhadap pelaku pelanggaran perda sehingga berdampak pada penganggaran Pemenuhan SPM
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda dan saksi pelanggaran terhadap Perda pengaturan Perda/Perkada
6. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi, indikator kinerja dan fungsi perencanaan yang efektif dan efisien
7. Kurangnya komitmen dan koordinasi dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagai jadwal (action plan)

Solusi

1. Senantiasa melakukan penataan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja
2. secara bertahap satuan Polisi Pamong Praja Memenuhi Kebutuhan sarana dan Prasarana yang diperlukan
3. Mengkoordinasikan Perencanaan Program kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM dan Mengkoordinasikan perencanaan Program kegiatan.
4. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran, serta penyebaran kontak person di masyarakat agar penanganan kebakaran cepat terdeteksi dan tertangani
5. Pemenuhan Anggaran SPM

4.5.7 Program dan Kegiatan

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM TRANTIBUM :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten



- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perdatan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)
- Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM TRANTIBUM
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
- Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pencegah dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

b. Urusan Bencana

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, dan pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; standar pelayanan dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.



3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

4.5.2 Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	- Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	100 %	2024
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2024

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana				
	1. Jumlah Warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana		144	144	100%
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		1	1	100%
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		0	0	0%
	c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		30	30	100%
	d. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		0	0	0%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan				



	terhadap bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana		90	90	100%
	a. Sarana prasarana penanggulangan bencana		3	3	100%
	b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		90	90	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3138	3138	100%
	a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		1	1	100%
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		3138	3138	100%
	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana		3	3	100%
	d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas		0	0	100%
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		2	2	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Rp. 31.522.260.621

4.5.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 15 orang. terdiri Pejabat Struktural 8 orang, fungsional 3 orang dan pelaksana 4 orang

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain :



1. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang urusan Bencana .
2. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas BPBD untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.
3. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparat BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan maupun relawan

Solusi

Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada dengan merencanakan untuk mengikutsertakan aparat yang ada dalam pelatihan teknis sesuai kebutuhan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

4.5.7 Program dan Kegiatan

A. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Bencana :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahandan kesiapsiagaan
 - Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana



- Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah. Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 8 Juni 2018. Dalam Peraturan menteri tersebut jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas di luar Panti Sosial skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2024



2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2024
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2024
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Presentase (%) tuna sosial di luar Panti Sosial skala kab/kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100%	2024
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	2024

4.6.3 Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi Dalam Tahun	Persentase
1	2	3	4	5
1.	1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	566	566	100 %
	a. Layanan data dan pengaduan	80	80	100%
	b. Penyediaan permakanan	25	25	100%
	c. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0%
	d. Penyediaan sandang	50	50	100%
	e. Penyediaan alat bantu	12	12	100%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	389	389	100%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	0	0	0%
	j. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	2	2	100%



	dan/atau Kartu Identitas Anak			
	k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	10	10	100%
	l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	n. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
	m. Layanan rujukan	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	357	357	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	80	80	100%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	255	255	100%
	d. Penyediaan sandang	58	58	100%
	e. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	203	203	100%
	g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	0	0	0%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0%
2.	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	2	100%
	i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	6	6	100%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
	l. Layanan rujukan	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	274	274	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	80	80	100%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	64	64	100%
	d. Penyediaan sandang	0	0	0%
	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
3.	g. Pemberian bimbingan fisik,	186	186	100%



	mental, spiritual dan sosial			
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	0% 0%
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	100%
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	l. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	0	0	0% 0%
	n. Layanan rujukan	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	0	0	0%
	TIDAK ADA REHABILITASI			
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	0	0	0%
	d. Penyediaan sandang	0	0	0%
	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
4.	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	0%
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	j. Akses ke layanan pendidikan	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%



	n. Layanan rujukan	0	0	0%
	o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0%
	p. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0%
	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100	38	38.00%
5.	a. Penyediaan permakanan	38	38	100%
	b. Penyediaan sandang	0	0	0%
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial mendapat alokasi anggaran sebesar

a. APBD

- Anggaran Satker Rp6.430.542.353
- Anggaran SPM Rp.810.569.500,

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Pegawai terdiri dari : 20 Orang terdiri Pejabat fungsional 7 orang, fungsional 6 orang dan pelaksana 7 orang.

4.6.6 Permasalahan Solusi

a. Permasalahan dan solusi

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008



tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya adalah mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat dalam Peraturan Lama tidak muncul di Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, padahal Jenis Pelayanan Dasar tersebut sangat penting dalam mendukung program pemerintah pada penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya permasalahan di atas, solusi agar diketahui oleh Pemerintah Daerah berikut kami sebutkan perhitungan presentase, alokasi anggaran dan dukungan personil mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya untuk Kepala Keluarga (KK) Miskin.

4.6.7 Program dan Kegiatan

A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SOSIAL :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan makanan
3. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Pmks Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA



BAB V

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai rangkaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu tahun 2023 secara umum sudah dapat berjalan dengan lancar dan penuh harapan. Berdasarkan indicator kinerja kunci keluaran, indicator kinerja kunci hasil dan indicator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun kesimpulan dan saran dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan indicator kinerja kunci keluaran, indicator kinerja kunci hasil dan indicator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan berjalan dengan baik, yang mana setiap Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib urusan pilihan dan trantibum linmas mampu menyelenggarakan kegiatan dan prioritas di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah dengan baik.
- b. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang mampu mengakomodir semua kegiatan di tiap-tiap satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan.

5.2. Saran

- a. Pemerintah Pusat perlu melakukan fasilitasi, supervise dan monitoring dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan di daerah sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal di tiap Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia di tiap Organisasi Perangkat Daerah lebih ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan mampu menjawab setiap permasalahan di tiap-tiap satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami sampaikan dan kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci			Rumusan/Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Pendidikan	Outcome	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 3.265 ----- x 100 %	70,79%	Dinas Pendidikan	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 4.612		Dukcapil		
		Outcome	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar 13.070 ----- x 100 %	96,33%	Dinas Pendidikan	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 13.567				
Outcome	3	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama 6.874 ----- x 100 %	99,29%	Dinas Pendidikan		
			1	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan 6.923				
Outcome	4	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 809 ----- x 100 %	0%	Dinas Pendidikan		
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan 0					
2	Urusan Kesehatan	Outcome	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 294 ----- x 100 %	2,26%	Dinkes	
				Jumlah Penduduk di Kabupaten 130.008		Dukcapil		
Outcome	2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 2 ----- x 100 %	100%	Dinkes		
			Jumlah RS di Kabupaten 2					

	Outcome 3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1.940 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten 2.422	80,09%	Dinkes	
	Outcome 4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan 1.470 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten 1.547	95,02%	Dinkes	
	Outcome 5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 1.476 ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten 2.202	67,02%	Dinkes	
	Outcome 6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7.339 ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten 10.422	70,41%	Dinkes	
	Outcome 7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 1.962 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten 20.490	9,57%	Dinkes	
	Outcome 8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 42.562 ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten 84.813	50,18%	Dinkes	
	Outcome 9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 4.185 ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten 13.473	31,06%	Dinkes	
	Outcome 10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17.554 ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten 27.561	63,69%	Dinkes	

		Outcome	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.531 ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten 2.021	75,75%	Dinkes	
		Outcome	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 205----- ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten 222	92,34%	Dinkes	
		Outcome	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1653 ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten 2.212	74,72%	Dinkes	
		Outcome	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 1.916 ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten 3.138	61,05%	Dinkes	
3	Urusan Pekerjaan Umum	Outcome	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) 39.802 -----x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) 99.778	39,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) 171.416 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) 208.047	82,39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

		Outcome	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) 366,87 -----x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten Ha 1.587,5	23,10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten 29.800 ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut 42.890	69%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 40.641 -----x100% Jumlah rumah di Kabupaten 42.890	94,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya 278 -----x100% jumlah IMB yang berlaku 278	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap 353.21 -----x100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 1.002,45	35,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analisis 0 ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analisis di wilayah Kabupaten 1	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

		Outcome	9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi 154 ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 154	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
4	Urusan Perumahan Rakyat	Outcome	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Unit Rumah 3 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 3	100%	Dinas Perumahan, Pemukiman	
		Outcome	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 0 ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan 1	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman	
		Outcome	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 0 ha yang ditangani (ha) 0,957 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 93	1,02%	Dinas Perumahan, Pemukiman	
		Outcome	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni 12.732 ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota 31.664	40,20%	Dinas Perumahan, Pemukiman	
		Outcome	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 0 ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten/kota 31.664	0,00%	Dinas Perumahan, Pemukiman	
5	Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Outcome	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani 31 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 31	100%	PoL- PP	

		Outcome 2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 5 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 8	62,5%	POL- PP	
		Outcome 3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 30 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan 30	100%	BPBD	
		Outcome 4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 129 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 7	1,84%	BPBD	
		Outcome 5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 7 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 7	100%	BPBD & POL PP	
		Outcome 6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran Perangkat Daerah 13 -----x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten 13	100%	BPBD & DAMKAR BPBD & DAMKAR	
		Outcome 7	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran.	23 Menit	DAMKAR	

6	Urusan Sosial	Outcome	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 863 ----- x 100 %	100,00%	Dinas Sosial	
		Outcome	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 863 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 37 ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten 37	100%	Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial	
7	Urusan Ketenagakerjaan	Outcome	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Kegiatan 4 -----x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota 4	100%	Disnaker Disnaker	
		Outcome	2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kopetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kopetensi 80 ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan 285	28,07%	Disnaker	
		Outcome	3	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 3.105,15 ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja 285	1,089,52%	Disnaker	
		Outcome	4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan 110	0%	Disnaker	

		Outcome	5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan 285 ----- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar 662	43,05%	Disnaker	
8	Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Outcome	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD Rp.7.218.480.813 ----- x 100 % Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD Rp. 1.120.333.977.631,3	0,64%	DP3AP2KB	
		Outcome	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi 30 ----- x 100 % Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 30	100%	DP3AP2KB	
		Outcome	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 25 ----- x 100 % Jumlah penduduk perempuan 56.065	44,59%	DP3AP2KB	
9	Urusan Pangan	Outcome	1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan 17,83 ----- x 100 % Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan 60	29,710%	Dinas Ketahan Pangan	
10	Urusan Pertanahan	Outcome	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 0 ----- x 100 % Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 0	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	
		Outcome	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan/fasilitas umum 0 -----x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	

		Outcome	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 0 -----x 100% Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		Outcome	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha 0 -----x 100% Jumlah penerima tanah objek landreform 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan/ Kantor Pertanahan	
		Outcome	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah 0 -----x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		Outcome	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan tanah garapan yang ditangani 6 -----x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 6	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
11	Urusan Lingkungan Hidup	Outcome	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten/kota	IKLH Kab = (IKA 30%) + (IKD 30%) = (IKL 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKLH = x) + (x) + (x) = IKLH = 0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	77,52	Dinas Lingkungan Hidup	
		Outcome	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani 8.105,92 ----- x 100 % Total volume sampah kabupaten 22.207	36,50%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Outcome	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lokasi lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota 39 ----- x 100 % Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 39	100%	Dinas Lingkungan Hidup	

12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Outcome	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki E-KTP 92.348 ----- x 100 % Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 93.512	98,75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Outcome	2	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA 19.868 ----- x 100 % Jumlah anak usia 0-17 tahun 36.500	54,43%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Outcome	3	Kepemilikan akte kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir 37.109 ----- x 100 % Jumlah anak usia 0-18 tahun 41,270	89,91%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Outcome	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah dimanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 9 ----- x 100 % Jumlah OPD 27	33,33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Outcome	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 15 ----- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) 15	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Outcome	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 39 ----- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) 113	34,51%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Outcome	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR $= 5 \sum_{i=1}^5 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	5,22%	DP3AP2KB	Siperindu Web

				<p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, , i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>				
		Outcome	2	<p>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)</p>	<p>Jumlah peserta KB aktif modern 14.283 ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur 21.632</p>	66,02%	DP3AP2KB	
		Outcome	3	<p>Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</p>	<p>Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani 4.120 Jumlah pasangan usia subur 21.632</p>	19,04%		
15	Urusan Perhubungan	Outcome	1	1	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/kota</p> <p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) <input type="checkbox"/> Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP <input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p>	0,47%	Dinas Perhubungan	

					<p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>			
		Outcome	2	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,067%	Dinas Perhubungan	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Outcome	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	<p>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>41</p> <p>----- x 100 %</p> <p>jumlah OPD 51</p>	80,39%	Dinas Kominfo	

		Outcome	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi 6 ----- x 100 % Jumlah layanan publik 12	50%	Dinas Kominfo	
		Outcome	3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan pemerintah kabupaten/kota 175.847 ----- x 100 % jumlah penduduk 78.289	224,61%	Dinas Kominfo	
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Outcome	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 2 ----- x 100 % jumlah seluruh koperasi 32	6,25%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan	
		Outcome	2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 232 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan 3.661	6,33%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan	
18	Urusan Penanaman Modal	Outcome	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten /kota 2.898.726.475 ----- x 100 % Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota 3.229.996.028	89,74%	Dinas PTSP	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Outcome	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota) 170 ----- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 20.490	0,82%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Outcome	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota) 614 ----- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 20.490	2,99%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Outcome	3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	5	Dinas Pemuda dan Olahraga	

20	Urusan Statistik	Outcome	1	Persentase Organisasi Perangkat (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) 0 ----- x 100 % Jumlah OPD 51	0%	Diskominfo	
		Outcome	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah) 0 ----- x 100 % Jumlah OPD 51	0%		
21	Urusan Persandian	Outcome	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi 0 ----- x 100 % Jumlah area penilaian 0	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Urusan Kebudayaan	Outcome	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 9 ----- x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata 9	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Urusan Perpustakaan	Outcome	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	75,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Berdasarkan laporan hasil survey minat baca
		Outcome	2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 : $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$ layanan perpustakaan 5 UPLM 2 : $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$ n koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan= UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	85,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

24	Urusan Kearsipan	Outcome	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ $T =$ Tingkat ketersediaan arsip $a =$ Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip $i =$ Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip $s =$ Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik $j =$ Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	41,09%		$a= 32.921$, $i=0$, $s=0$, $j=0$ $T=(32.921+0+0+0)/4$
		Outcome	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ $T =$ Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban $m =$ Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK = $b =$ Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK $g =$ Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK $a =$ Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK $c =$ Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK $i =$ Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	11,85%		
25	Urusan Perikanan	Outcome	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota 718.779,87 ----- ----- x 100 %	1,0959	One data KKP	
					Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan 655.873,35			
26	Urusan Pariwisata	Outcome	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n- jumlah wisatawan tahun n-1 (1905 - 319) ----- x 100 %	497,17%	Dinas Pariwisata	
		Outcome	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n- jumlah wisatawan tahun n-1 146.860 - 133.614 ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1 133.614	9,91%	Dinas Pariwisata	

		Outcome	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 11.583 ----- x 100 % Jumlah kamar yang tersedia 76.285	15,18%	Dinas Pariwisata	
		Outcome	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB 22,93 ----- x 100 % Total PDRB Berlaku 5.377.32	0,43%	Dinas Pariwisata	
		Outcome	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata 1.301.047.179,20 ----- x 100 % Total realisasi PAD 51.896.513.660,06	2,51%	Dinas Pariwisata	
27	Urusan Pertanian	Outcome	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hectar per tahun 7.744,7 ----- x 100 % Luas panen 1.682,63	460,27%	Dinas Pertanian	
		Outcome	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) (0 - 0)/ ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 0	0%	Dinas Pertanian	
28	Urusan Kehutanan	Outcome	1			100		
29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Outcome	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi 1	0%	Dinas Perumahan	
30	Urusan Perdagangan	Outcome	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan 0 ----- x 100 % Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota 0	0,00%	Dinas PERIDAGKOP-UKM dan DPMPSTP	
		Outcome	2	Persentase kinerja pupuk	Realisasi 76.400 ----- x 100 % RDKK 288.013	26,52%	Dinas Pertanian	

		Outcome	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 60,029 ----- x 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota 125.212	47,94%	Dinas Koperindak	
31	Urusan Perindustrian	Outcome	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) 1-1 ----- x 100 % Jumlah industri n-1 1	0%	Dinas Koperindak	
		Outcome	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	0%	Dinas Koperindak	Surat Keterangan
		Outcome	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan 0	0%	Dinas Koperindak	Surat Keterangan
		Outcome	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	0%	Dinas Koperindak	Surat Keterangan
		Outcome	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	0,83%		

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci			Rumusan/Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Outcome	1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Rp. 203.502.896.971 ----- ----- x 100 % Jumlah APBD Rp. 1.029.723.180.070	19,76%	BPKAD	
		Outcome	2	Rasio PAD	Jumlah PAD 51.914.364.926,06 ----- x 100 % Jumlah Pendapatan pada APBD 1.027.896.553.307,06	5,05%	BPKAD	
		Outcome	3	Maturitas sistem pengendalian inter pemerintahan (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Inspektorat	
		Outcome	4	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Inspektorat	
		Outcome	5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures 877.768.712.700,1 ----- x 100 % Jumlah belanja APBD 1.120.333.977.631	78,34%	BPKAD	
		Outcome	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	2 WTP	BPKAD	Tahun 2024 on proses
2	Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Outcome	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n 0 ----- ----- x 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun n 174	0%	Bagian PBJ	
		Outcome	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 357 ----- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 2.365	15,09%	Bagian PBJ	
		Outcome	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan Rp. 161.887.614.443 ----- x 100 % Total belanja operasional dan modal Rp. 951.171.051.589,5	17,01%	Bagian PBJ	

		Outcome	4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1 Rp. 67.259.620.608 ----- x 100 %	76,16%	Bagian PBJ	
					Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) 88.307.113.164			
3	Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Outcome	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 982 -----x 100% Seluruh jumlah pegawai 1.354	72,52%	BKPSDM	
		Outcome	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 277 -----x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.354	20,45%	BKPSDM	
		Outcome	3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kopetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kopetensi 75 ----- x 100 % Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 283	26,50%	BKPSDM	
4	Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Outcome	1	Deviasi relisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(1.029.723.180.070/998.861.437.548) -1 x 100 $\left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \times 100\%$	3,08%	BPKAD	

		Outcome	2	Deviasi PAD terhadap PAD dalam APBD	(51.914.364.916,06/ 53.906.989.856,00)-1 x 100 % $\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) \cdot 1 \times 100\%$	3,69%	BPKAD	
		Outcome	3	Assets Management	1. Apakah daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses investarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Tidak Ya Ya	BPKAD	
		Outcome	4	Rasio anggaran terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA 50.417.318.605,65 -----x100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya Rp. 849.032.765.461.21	5,94%	BPKAD	
5	Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik	Outcome	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 143.330.070.980,- ----- x 100 % Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 4.305.569.000	96,25%	Dinas Kominfo	
		Outcome	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda 8 ----- - x 100 % Total jumlah dokumen yang telah dirinci 12	66,66%	Dinas Kominfo/BPKAD	